

GOTONG ROYONG, KOPERASI DAN DEMOKRASI EKONOMI

Inggar Saputra

ABSTRAK

Konsep koperasi disebut Hatta sebagai gerakan perekonomian rakyat yang cocok diterapkan di Indonesia yang bercorak sosialis. Hatta mengambil inspirasi mendirikan koperasi dari negara Skandinavia. Saat masih berkuliah di Belanda, Hatta pada tahun 1925 berkunjung ke Denmark dan Swedia untuk belajar mengenai koperasi. Ketika mengalami pengasingan di Banda Neira tahun 1930, Hatta menghidupkan konsep koperasi bersama Syahrir dan Iwa Kusuma.

Perekonomian Indonesia merdeka diatur dengan usaha bersama khususnya yang berhubungan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi ekonomi dilakukan dengan adanya koperasi sebagai dasar perekonomian yang saling bekerja sama untuk membela kepentingan rakyat. Koperasi merupakan wujud kongkret dari demokrasi ekonomi. Bangsa Indonesia harus menyadari bahwa segala usaha yang ada harus dikerjakan secara gotong-royong. Budaya bergotong-royong akan melahirkan kebiasaan bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Koperasi dapat dipilih sebagai watak dasarnya bersifat tolong menolong, baik menolong dirinya sendiri dan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Model demokrasi ekonomi kolektif seperti koperasi ini dinilai sangat ideal dan akan berhasil. Ini disebabkan koperasi tidak menghasilkan kebebasan tanpa batas, persaingan pasar bebas dan individualism yang sudah terbukti gagal memajukan kehidupan ekonomi Indonesia dan bangsa lain di dunia.

Budaya Gotong Royong Dalam Masyarakat Indonesia

Dalam sejarah bangsa di dunia, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan suka bergotong royong. Semangat ini tidak tumbuh secara instan, melainkan mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Idealisme ini dibangun atas sebuah pemikiran bahwa Indonesia lahir dari semangat kekeluargaan. Bangsa ini merdeka atas dasar kesamaan pemikiran, kesatuan perjuangan dan perasaan senasib sepenanggungan. Ini yang mendasari semangat Indonesia merdeka dari penjajahan yang secara konstitusional ditegaskan *“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sebab tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”*

Tindakan gotong royong masyarakat Indonesia ini sejak dulu terbukti mampu membawa bangsa ini memenangkan pertarungan sejarah. Ketika masa pra kemerdekaan, para pejuang republik aktif berkonsolidasi menekan penjajah Belanda dan Jepang agar segera mengakhiri penjajahan mereka di Indonesia. Terlepas dari pilihan kaum pergerakan Indonesia yang berbeda-beda dengan menempuh jalur pergerakan nasionalisme, agama dan komunisme, kaum pergerakan secara kompak memiliki kesatuan tekad mengusir penjajah. Menjelang Indonesia merdeka dan perumusan dasar negara, konsep gotong royong juga menginspirasi para pahlawan bangsa untuk menafsirkan gotong royong sebagai musyawarah mencapai mufakat. Ini menjadi dasar dari prinsip universal yang mendorong kelahiran Pancasila khususnya sila keempat.

Konteks masyarakat Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila, konsep gotong royong memiliki nilai yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Prinsip gotong royong bersifat universal, sehingga mudah diakui, dimiliki, diterapkan masyarakat Indonesia sehingga bersifat nasional dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Berbagai pekerjaan yang bersifat kepentingan umum (pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan lainnya) dan kepentingan pribadi (perkawinan, kelahiran, kematian dan lainnya) sangat erat kaitannya dengan prinsip bergotong royong. Ini menegaskan bagaimana gambaran bangsa Indonesia adalah makhluk sosial yang senantiasa mengedepankan empati, simpati dan dependensi (ketergantungan-pen) kepada manusia lainnya. (Derung, 2019)

Dalam struktur budaya masyarakat Indonesia, gotong royong dikenal luas sebagai bentuk kearifan lokal dengan berbagai macam penyebutan nama. Masyarakat Aceh mengenal tradisi *khanduri*, sebuah tradisi yang bertujuan memohon keberkahan, keselamatan dan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. *Khanduri* dalam prakteknya dilaksanakan melalui kegiatan doa bersama, memberi makan tetangga dan saudara dan makan bersama secara kolektif (Prasetyo, 2009) Tidak jauh berbeda, masyarakat Bali mengenal *spirit gotong royong* dalam tradisi *subak* yaitu lembaga tradisional yang berfungsi membentuk ikatan antar petani dalam mengurus dan memanfaatkan sawah secara kolektif (Bintarto, 1980). Sementara itu, Koentjaraningrat (1974) menjelaskan dalam budaya masyarakat

Jawa muncul tradisi *guyuban*, *nyurung* dan *tetulung layat*. *Pertama*, *Guyuban* yaitu gotong royong masyarakat dalam melakukan pekerjaan kecil disekitar rumah atau pekarangan, misalnya memperbaiki dinding rumah, membersihkan atap rumah, atau membersihkan pekarangan. *Kedua*, *Nyurung* yaitu bentuk gotong royong ketika ada warga desa yang memiliki hajatan sunat, perkawinan, kelahiran dan lain – lain. *Ketiga*, *Tetulung Layat* yaitu bentuk gotong royong masyarakat dalam mengurus penduduk desa yang meninggal dunia.

Lebih jauh ditegaskan, tindakan sosial berbentuk gotong royong memiliki dua perspektif. *Pertama*, kerjasama yang berasal dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri atau *bottom up* (Sumarsono, 2010). Kerja sama ini terjadi disebabkan muncul kebutuhan yang besar, bersifat kolektif dan saling timbal balik dalam sebuah kelompok masyarakat. *Kedua*, kerjasama dari masyarakat yang berasal dari luar, sehingga bersifat *top down*. Kebijakan ini muncul dari kebutuhan antar kelompok masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kedua kerjasama ini dilaksanakan secara turun temurun untuk mempersatukan masyarakat sehingga tercapai masyarakat yang mampu hidup penuh kedamaian, kerukunan dan bersatu di tengah kemajemukan yang tumbuh secara alami dalam kehidupan bangsa Indonesia (Derung, 2019)

Berangkat dari pemikiran gotong royong sebagai budaya asli bangsa Indonesia yang diperkuat konstitusi pasal 33 UUD 1945 menginspirasi pemikir dan pendiri bangsa dalam merumuskan konsepsi Pancasila. Dalam rapat perumusan dasar negara, Soepomo menyampaikan pidato kebangsaan mengenai konsepsi negara integralistik. Paham integralistik menekankan persatuan masyarakat yang organis, adanya jaminan kepentingan dan keselamatan hidup seluruh masyarakat Indonesia dan negara berpihak kepada rakyat, bukan kepada golongan paling kuat atau besar. Soekarno juga menyebut konsep gotong royong dalam pidatonya, *“Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. “Gotong-royong” adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-*

royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo: satu karyo, satu gawe! Gotongroyong adalah membanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Holupis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong-royong” (Kusuma, 2004).

Koperasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Ekonomi

Secara mendalam, konsep gotong royong Indonesia tercantum dalam konstitusi khususnya pasal 33 UUD 1945 yang menjadi pijakan pemikiran kedaulatan ekonomi Indonesia. Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara serta bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Dari rumusan ini, kita dapat melihat semangat ekonomi Indonesia adalah berdasarkan gotong royong yang diterjemahkan luas dalam koperasi. Membahas pasal 33 UUD 1945 dan koperasi, maka bayangan kita akan segera teringat kepada Mohammad Hatta.

Sosok Muhammad Hatta lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Sejak kecil menghabiskan waktunya dengan buku, belajar mengaji dan bermain sepakbola. Pria berkacamata ini sangat mencintai buku dan selalu bersemangat untuk belajar. Pendidikan formal dijalani di *Europeese Lagere School (ELS)* dan lulus tahun 1916. Kemudian menamatkan *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO)* di Padang tahun 1919. Hatta juga sukses menyelesaikan pendidikannya di *Prins Hendrik School* tahun 1921. Setelah itu, Hatta muda merantau untuk menuntut ilmu ekonomi di *Handels Hoogere School* (Sekolah Tinggi Ekonomi), Rotterdam Belanda, mengambil jurusan ekonomi perdagangan dan berpindah jurusan ekonomi kenegaraan. Hatta menyelesaikan kuliahnya di Belanda tahun 1932 dengan gelar sarjana ekonomi (Maryono, 2015)

Setelah selesai sekolah di luar negeri, Hatta kemudian pulang ke Indonesia untuk berjuang secara ekonomi dan politik menuju Indonesia merdeka. Perjuangan diplomasi banyak dijalani Hatta bersama Soekarno dan bapak pendiri bangsa lainnya. Puncak perjuangan Hatta dan pendiri bangsa lainnya adalah saat Indonesia

berhasil memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Setelah merdeka, Hatta semakin aktif dalam menggagas koperasi sebagai konsep kemerdekaan ekonomi Indonesia. Meski lama mengalami pendidikan model Barat, Hatta tidak kehilangan semangat pergerakan kebangsaan termasuk dalam ilmu yang ditekuninya yaitu ekonomi. Dalam berbagai kesempatan, Hatta tidak pernah kehilangan semangat dalam menyebarkan pemikirannya ekonomi kerakyatan dan koperasi. Baginya perjuangan ekonomi dan politik menjadi tanggung jawab intelektual dan kemerdekaan yang tidak akan pernah selesai untuk diperjuangkan sampai berhasil mencapai tujuannya.

Konsep koperasi disebut Hatta sebagai gerakan perekonomian rakyat yang cocok diterapkan di Indonesia yang bercorak sosialis. Hatta mengambil inspirasi mendirikan koperasi dari negara Skandinavia. Saat masih berkuliah di Belanda, Hatta pada tahun 1925 berkunjung ke Denmark dan Swedia untuk belajar mengenai koperasi. Ketika mengalami pengasingan di Banda Neira tahun 1930, Hatta menghidupkan konsep koperasi bersama Syahrir dan Iwa Kusuma. Saat itu dibuat Perbamo (Perkumpulan Banda Muda) yang bertugas membeli semua hasil bumi dari perahu yang datang ke pelabuhan, kemudian menjualnya langsung kepada masyarakat. Melalui konsep urun daya ini, Perbamo memotong jalur distribusi sehingga harga barang menjadi lebih murah (Pamungkas, 2020)

Melihat gagasan Hatta melalui Perbamo, kita dapat melihat bagaimana sejatinya koperasi mampu mendorong kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Ada semangat kesetiakawanan sosial, kerjasama dan bagaimana menciptakan pasar yang berpihak kepada rakyat. Kebutuhan hidup masyarakat dimudahkan dengan pemotongan jalur distribusi dan terikat tanggung jawab bersama. Lebih jauh, koperasi mendidik manusia Indonesia untuk mencapai kesetaraan ekonomi. Ini sekaligus menentang konsep ekonomi kapitalis yang melahirkan relasi buruh dan majikan. Dalam koperasi relasi yang dibangun atas dasar semangat kesetaraan keadilan ekonomi sesuai kandungan pasal 33 UUD 1945.

Pada tahun 1952, Hatta menegaskan koperasi adalah bentuk kemerdekaan dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Analisisnya bermuara pada tiga hal keprihatinannya terhadap kondisi bangsa Indonesia. Pertama, kondisi ekonomi

Indonesia mengalami kerusakan akibat peperangan yang lama melawan penjajahan. Kedua, di awal kemerdekaan Indonesia kondisi kas negara dalam keadaan kosong, dimana tahun 1950 negara mengalami defisit 1,5 miliar rupiah. Ketiga, bangsa Indonesia hidup dalam kondisi miskin dimana pendapatan per orang kurang lebih mencapai 25 dollar per tahun (Gitiyarko, 2021)

Dalam menyikapi kondisi itu, penting sekali mendudukan konsep koperasi Indonesia berelasi dengan Pancasila dan UUD 1945. Sejatinya koperasi berakar dari kebudayaan tradisional Indonesia yang berpusat pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Struktur ekonomi Indonesia membutuhkan ekonomi rakyat yang berpedoman kepada nilai religiusitas, humanisme dan demokratis. Fondasi dasar itu ditambah jiwa bangsa Indonesia yang mengutamakan semangat kebersamaan dan terbangun atas sistem kekeluargaan. Menjadi tepat jika koperasi yang mampu mewujudkan cita-cita keadilan sosial berlandaskan spirit kesejahteraan bersama sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 (Nasution dan Lasivo, 2012)

Koperasi yang digagas Hatta dapat diangkat dari dua pemikiran yang saling bersinggungan. Manusia lahir sebagai makhluk individu dan sosial yang mengalami ketergantungan (saling membutuhkan) dan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani akan berjalan ketika ditempatkan dalam masyarakat sehingga keputusan individu sejatinya harus sejalan dengan kehendak masyarakat. Dari konsep ini, manusia Indonesia harus saling bekerja sama dan menjunjung tinggi solidaritas untuk mencapai kepentingan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama, perlu dibangun sistem ekonomi kolektif. Dimana kepemilikan kekayaan alam Indonesia tidak dimonopoli individu melainkan milik bersama, yang diterjemahkan melalui koperasi sebagai bentuk nyata.

Menurut Hatta, tujuan politik ekonomi Indonesia adalah menaikkan daya beli masyarakat secara perlahan untuk mencapai kemakmuran (Hatta, 1952) Setiap orang di Indonesia harus mampu menolong diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan perumahan (Hatta, 1954). Untuk membangun ekonomi rakyat, dapat melalui dua cara yaitu pembangunan melalui koperasi dan pemerintah (Hatta, 1971) Koperasi ditujukan untuk

membangun persekutuan yang lemah untuk membela keperluan hidupnya dengan biaya yang murah, bukan mengejar keuntungan semata.

Demokrasi Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat

Pemikiran gotong royong sebagai warisan budaya asli bangsa Indonesia dan koperasi sebagai tafsiran ekonomi atas budaya gotong royong adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua hal itu berkorelasi pada pemahaman dan sikap atas kedaulatan bangsa Indonesia yang mengacu kepada demokrasi ekonomi sebagai cita-cita bersama bangsa Indonesia. Demokrasi ekonomi menekankan adanya tanggung jawab negara untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan melahirkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “...*perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.*”

Demokrasi ekonomi Indonesia memiliki ciri khas yang sesuai dengan tradisi dalam masyarakat Indonesia dan berpedoman kepada nilai kolektivisme. Demokrasi Indonesia diharapkan mampu melahirkan demokrasi sosial yang mengacu kepada tiga sumber pemikiran utama. *Pertama*, paham sosialisme Barat, yang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Kedua adalah ajaran Islam, yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. (Hatta, 2000a, hlm. 435)

Demokrasi ekonomi di Indonesia harus sejalan dengan kemanusiaan, keadilan dan keadaban sesuai sila kedua Pancasila. Selain itu harus ada pengakuan kepada Tuhan dalam menjalankan demokrasi ekonomi, bukan semata mendewakan materi dan memberikan kebebasan tanpa batasan. Sebab sila pertama Pancasila mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ini diperkuat pula pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan: “*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha*

Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi peran manusia sebagai makhluk sosial, demokrasi ekonomi Indonesia harus mencerminkan nilai dasar kolektivisme. Perubahan zaman akibat globalisasi dan modernisasi tidak selayaknya meminggirkan budaya gotong royong dan solidaritas sosial yang sudah mengakar kuat jauh sebelum Indonesia merdeka.(Levia dkk, 2018)

Demokrasi ekonomi di Indonesia harus memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Negara sebagai pemegang kendali memiliki kewajiban mendistribusikan kekayaan sumber daya alam dan manusia Indonesia untuk mencapai tujuan bersama. Negara juga perlu menjamin hak-hak ekonomi rakyat agar tidak melahirkan kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin. Dalam realisasinya segala kegiatan ekonomi di Indonesia harus mengacu kepada pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Inilah pijakan dari pemikiran kolektivisme yang diterjemahkan Hatta melalui bentuk koperasi.

Perekonomian Indonesia merdeka diatur dengan usaha bersama khususnya yang berhubungan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi ekonomi dilakukan dengan adanya koperasi sebagai dasar perekonomian yang saling bekerja sama untuk membela kepentingan rakyat. Koperasi merupakan wujud kongkret dari demokrasi ekonomi. Bangsa Indonesia harus menyadari bahwa segala usaha yang ada harus dikerjakan secara gotong-royong. Budaya bergotong-royong akan melahirkan kebiasaan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Semua hal yang menyangkut kepentingan umum, maka keputusan akhirnya diambil dengan kesepakatan bersama sebagai terlihat misalnya pada rapat desa. Rapat desa diselenggarakan di bawah pimpinan kepala desa dan semua orang anggota masyarakat desa yang dewasa berhak menghadiri, ikut dan memberikan suara atau pendapatnya pada forum tersebut. Rapat desa menjadi tempat rakyat berkumpul untuk bermusyawarah demi mencapai mufakat terhadap

semua urusan yang bersangkutan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama (Hatta, 1994).

Menghargai Budaya, Memajukan Ekonomi Indonesia

Mengenai hal ini, kita selayaknya bersyukur sebagai bangsa Indonesia memiliki budaya gotong royong yang sudah berjalan turun temurun. Warisan budaya asli bangsa Indonesia dengan berbagai macam penyebutannya ini harus terus dilestarikan generasi penerus. Di tengah serbuan modernisasi dan globalisasi yang ditandai kecepatan perkembangan teknologi yang melahirkan revolusi industri, sistem sosial gotong royong selayaknya tidak ditinggalkan. Alih-alih ditinggalkan, masyarakat Indonesia yang mencirikan kehidupannya pada sistem kolektivisme justru harus semakin menguatkan diri dan selektif berbagai budaya asing yang masuk ke Indonesia. Sebuah bangsa akan dihargai bangsa lain ketika mampu menghargai kedaulatan budaya miliknya sendiri. Adanya budaya asing tidak ditolak, tetapi harus mampu beradaptasi dengan sistem budaya yang sudah dimiliki bangsa Indonesia.

Dengan semakin ditinggalkan sistem kapitalisme dan komunisme di dunia, Indonesia harus mampu tampil ke depan menawarkan demokrasi ekonomi miliknya. Demokrasi ekonomi yang bersandarkan kepada cita-cita kesejahteraan bersama dan mendukung terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Negara memainkan peran sebagai distribusi kekayaan sumber alam dan manusia, sementara manusia bergerak secara bersama menuju kemakmuran ekonomi dengan tidak melalui sistem persaingan pasar bebas yang mematikan potensi ekonomi kelompok marginal dan menguntungkan kelompok kaya semata. Koperasi dapat dipilih sebagai watak dasarnya bersifat tolong menolong, baik menolong dirinya sendiri dan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Model demokrasi ekonomi kolektif seperti koperasi ini dinilai sangat ideal dan akan berhasil. Ini disebabkan koperasi tidak menghasilkan kebebasan tanpa batas, persaingan pasar bebas dan individualism yang sudah terbukti gagal memajukan kehidupan ekonomi Indonesia dan bangsa lain di dunia.

Daftar Pustaka

A.B. Kusuma. 2004. *"Lahirnya Undang-undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan"*. Jakarta:Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Bintarto, R. 1980. *"Gotong Royong: Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia"*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Derung, Noiman Teresia, *"Gotong Royong dan Indonesia"*. Jurnal Kateketik dan Pastoral. Vol 1, No. 1, Mei 2019. hal. 5-13.

Fauzil Pamungkas, 2020. *"Bung Hatta dan Koperasi"*, 17 Juli 2020, Historia, dapat diakses dari <https://historia.id/ekonomi/articles/bung-hatta-dan-koperasi-P4n15/page/1>

Koentjaraningrat. 1974. *"Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan"*. Jakarta: Gramedia.

Maryono, *"Bung Hatta, Proklamator, Ilmuwan, Penulis Dan Karya-Karyanya: Sebuah Analisis Bio-Bibliometrik"* Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi - Volume XI Nomor 2, 2015

Mohammad Hatta. (1952). *"Kumpulan Karangan Jilid I"*. Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Indonesia.

Mohammad Hatta. (1954). *"Kumpulan Karangan Jilid III"*. Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Indonesia.

Mohammad Hatta. (1971). *"Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun"*. Jakarta: Inti Idayu.

Mohammad Hatta. (1994). *"Menuju Indonesia Merdeka Kebangsaan dan Kerakyatan"*. Jakarta: Dekopin.

Mohammad Hatta. (2000a). *"Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 2, Kemerdekaan dan Demokrasi"*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Nana Aditya, Saiful Bachri, Tri Yuniyanto. *"Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1953-1972 Dan Implementasinya Terhadap Pembelajaran Kelas XII Sma"* Jurnal CANDI Vol. 13 No. 1, April 2016, hal. 53-71.

Nasution dan Lasivo, *"Hakikat Koperasi Menurut Mohammad Hatta Dalam Perspektif Filsafat Pancasila: Relevansinya Bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia"* Disertasi Program Doktor Filsafat UGM Tahun 2012

Prasetyo, Kuncoro Bayu. 2009. *“Menjadi Aceh di Panti Asuhan: Studi tentang Sosialisasi Anak Aceh di Panti Asuhan Pasca Bencana”*. Tesis S2, tidak diterbitkan. Yogyakarta: Pascasarjana Antropologi Universitas Gadjah Mad

Raden Levia Asriana, Aim Abdulkarim, Kokom Komalasari. *“Kajian Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Demokrasi Di Indonesia”*. Jurnal Civicus, Volume 18, No.12 (Desember, 2018). hal. 30-38

Sumarsono, 2010. *“Sosiologuistik”*. Yogyakarta: Sabda

Vincentius Gitiyarko, 2021. *“Koperasi Indonesia Dalam Pemikiran Bung Hatta”*. Kompas. 21 Juli 2021 dapat diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/koperasi-indonesia-dalam-pemikiran-bung-hatta>